

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kita sangat membutuhkan pajak untuk membiayai keperluannya seperti pembangunan infrastruktur misalnya jalan dan jembatan, subsidi untuk makanan, beras, benih dan pupuk. Serta untuk belanja pegawai seperti gaji guru, polisi, dan juga bantuan sosial untuk keluarga miskin yang membutuhkan banyak kontribusi dari penerimaan pajak. Melihat situasi seperti itu, tampaknya kita perlu menyadari sekali lagi bahwa perpajakan sangat penting untuk menghimpun dana bagi negara kita yang besar dan padat penduduknya. Langkah-langkah pimpinan puncak kita sepertinya sudah tepat, yaitu mendukung Administrasi Perpajakan Negara dalam memperkuat organisasinya agar dapat menjalankan tugasnya dengan lancar. Pimpinan juga terus memberikan dukungan agar wajib pajak paham, tentang informasi yang bisa meningkatkan kontribusi wajib pajak kepada negara. Selanjutnya yang mungkin harus dijaga adalah konsistensi dari semuanya, karena kegiatan sosialisasi dan peningkatan pemahaman atau kesadaran bukan suatu hal yang bisa dilakukan sekali atau dua kali tetapi harus terus berulang. Semoga dukungan seperti ini bisa terus diberikan, agar kita bisa bekerja lebih baik lagi, kesadaran masyarakat dan wajib pajak terus meningkat yang akhirnya mewujudkan cita-cita selama ini, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta target juga tercapai karena pajak milik bersama (pajak.go.id). Perpajakan di Indonesia terus berkembang mengikuti kondisi perekonomian Negara yang semakin bertumbuh. Inovasi selalu dilakukan oleh pemerintah, baik dari peraturan perpajakan yang selalu di *update* maupun dari kemajuan teknologi yang memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Semua hal tersebut dilakukan agar target penerimaan pajak bisa tercapai.

Mewujudkan cita-cita Bangsa tersebut perlu kesungguhan, maka perlu dilihat seberapa besar penerimaan pajak yang telah dicapai oleh pemerintah saat

ini. Pencatatan penerimaan perpajakan hingga akhir Oktober 2019 masih jauh dari target penerimaan APBN 2019. Hal ini memunculkan potensi *shortfall* pajak yang diprediksi mencapai Rp150 triliun hingga Rp180 triliun sampai akhir tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini disebabkan kebijakan restitusi, pelemahan kinerja ekspor dan impor, serta penurunan harga komoditas global (agil dan saragih, 2019). *Shortfall* pajak merupakan kondisi di mana realisasi lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN atau APBN-Perubahan. Konteks penerimaan pajak *shortfall* sering terjadi ketika realisasi penerimaan pajak dalam satu tahun kurang dari target penerimaan pajak (Aprilia, 2019). Menurut data realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 2016 sampai 2019 Indonesia tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan dalam APBN. Pada tahun 2016: realisasi Rp 1.283 triliun atau 83,4% dari target Rp 1.539 triliun *shortfall* Rp 256 triliun, 2017: realisasi Rp 1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp 1.283 triliun *shortfall* Rp 136 triliun, 2018: realisasi Rp 1.315,9 triliun atau 92% dari target Rp 1.424 triliun *shortfall* Rp 108 triliun, 2019: realisasi Rp 1.332,1 triliun atau 84,4% dari target Rp 1.577,6 triliun *shortfall* Rp 245,5 triliun (Lidya, 2020). Meningkatkan penerimaan pajak tidaklah mudah, pemerintah perlu mendorong sektor-sektor usaha yang mendatangkan penerimaan pajak besar seperti industri makanan-minuman, UKM/IKM, industri otomotif yang berorientasi ekspor, dan industri pengolahan sumber daya alam untuk mendapatkan nilai tambah dalam negeri.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengungkapkan dalam laporan terbarunya tentang faktor-faktor penentu tinggi dan rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) di berbagai negara, (terutama Asia dan Pasifik) menemukan bahwa rasio pendapatan pajak di Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) lebih rendah dari negara lain yang telah disurvei. Faktor struktur ekonomi merupakan penentu utama *tax ratio* di banyak Negara. Misalnya, seberapa besar peran sektor agrikultur dalam perekonomian suatu negara akan menentukan tingkat perpajakan di negara tersebut. *Organisation for Economic Co-operation and Development* OECD menyebut besarnya porsi sektor pertanian di Indonesia di atas 10% PDB, menjadi salah satu penyebab *tax ratio* relatif rendah (olivia G, 2019). Dengan melihat kondisi tersebut dapat diartikan sumber daya

alam Indonesia belum memberikan kontribusi yang cukup kepada negara. Menurut yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara agraris terbesar, dengan potensi hasil pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang melimpah. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa sebagian besar orang Indonesia berkecimpung dalam kegiatan komersial sebagai petani dan nelayan. Peran petani dan pemerintah tidak terlepas dari keberhasilan menghasilkan produk pertanian yang melimpah atau mencapai swasembada pangan. Oleh karena itu, penerimaan pajak dari sektor pertanian diharapkan dapat ditingkatkan dan dioptimalkan untuk mencapai tujuan APBN. Pemerintah terus mendorong optimalisasi sektor agrikultural yang terkendala permasalahan permodalan, sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan perekonomian nasional. Indonesia adalah negara besar dengan potensi dan peluang ekonomi yang sangat besar. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang bisa menjadi peluang memajukan perekonomian. Setidaknya ada empat sektor potensial yang akan menopang laju perekonomian Indonesia pada masa mendatang yakni pelayanan konsumen atau jasa, pertanian dan perikanan, sumber daya alam, serta pendidikan (Aunur Rofiq, 2015).

Pertumbuhan perusahaan sektor agrikultural bergantung dari kelangsungan bisnis dan profitabilitasnya. Profitabilitas secara umum didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang diukur dengan rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan ukuran tingkat efektivitas manajemen dalam pengelolaan aset suatu perusahaan (Kasmir, 2016, h.196). Pendapatan usaha suatu perusahaan tidak berubah dalam satu periode, tetapi margin laba brutonya mengalami penurunan selama periode waktu yang sama hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya biaya penjualan, administrasi dan umum yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Jumlah biaya penjualan atau biaya pemasaran dan administrasi dan umum tersebut merupakan biaya operasional perusahaan atau biaya komersial perusahaan (Mulyadi, 2010, h.14). Biaya operasional perusahaan merupakan biaya yang harus ditanggung perusahaan yang tidak berkaitan langsung dengan produk tetapi berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Biaya operasional perusahaan memiliki keterkaitan dengan pajak penghasilan badan karena menurut undang-undang Perpajakan ayat 1 UU No.36 tahun 2008 mengatur bahwa biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha

merupakan biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan wajib pajak dalam negeri. Biaya yang cukup mempengaruhi lainnya adalah pembayaran bunga yang sering mempengaruhi laba perusahaan. Profit yang besar tidak menjamin laba yang maksimal jika utang perusahaan tidak dapat dikendalikan. Diperlukan manajemen keuangan yang baik untuk pengendalian kebijakan perusahaan, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat ditekan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu menghasilkan laba yang maksimal.

Dalam hal ini, pajak memiliki keterkaitan dengan profitabilitas, biaya operasional dan utang. Perusahaan yang bergerak di sektor agrikultural dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi berkaitan dengan laporan keuangannya, karena telah memenuhi persyaratan tertentu yang dicantumkan dalam ketentuan (idx.co.id). Laporan keuangan laba rugi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap tahunnya akan mengalami perubahan pada tingkat laba maupun pajak penghasilan badan perusahaan, sehingga hal tersebut akan menarik untuk dikaji. Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai pajak penghasilan badan melalui laporan sisi laba-ruginya ataupun sisi neraca, tetapi belum ada yang meneliti kedua laporan tersebut secara bersamaan (neraca dan laba-rugi).

Sesuai uraian yang disampaikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada laporan keuangan (neraca dan laba-rugi) tentang faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak penghasilan badan pada perusahaan yang bergerak dalam sektor agrikultural pada laporan laba rugi dan neracanya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Biaya Operasional dan *Debt to Equity Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Pada Perusahaan Agrikultural yang Terdaftar di BEI periode 2016-2019)”**.

2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat penulis ambil pada penelitian ini adalah

1. Apakah *Gross Profit Ratio* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang?
2. Apakah *Return on Asset* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang?
3. Apakah Biaya Operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang?
4. Apakah *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang?
5. Apakah *Gross Profit Ratio*, *Return on Assets*, Biaya Operasional dan *Debt to Equity Ratio* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang?

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Gross Profit Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Return on Asset* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
3. Untuk menganalisis pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Gross Profit Ratio*, *Return on Assets*, Biaya Operasional dan *Debt to Equity Ratio* secara bersama-sama terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

4.1 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian tentang Pengaruh Profitabilitas dan Struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menentukan regulasi perpajakan mengenai pajak penghasilan badan terutang untuk meningkatkan pendapatan pajak sesuai yang telah ditargetkan oleh pemerintah.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dalam pemahaman tentang pentingnya kontribusi pajak kepada negara. Serta mengetahui bagaimana menganalisis suatu perusahaan melalui laporan keuangan yang disajikan, untuk mengetahui kondisi perusahaan dan besarnya pajak yang diberikan kepada negara.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pendanaan dan menjadi tolak ukur dalam menentukan profitabilitas yang mempengaruhi pajak perusahaan.

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi investor sebelum memutuskan untuk menginvestasikan modalnya kepada suatu perusahaan dengan memperhatikan analisis laporan keuangan yang disajikan.

5. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan mengenai kontribusi pajak oleh perusahaan yang diteliti demi kemajuan negara.